

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembentukan tanggung jawab telah dilakukan di sekolah sejak dini, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, sampai saat ini upaya tersebut dampaknya belum signifikan dalam menumbuhkembangkan kesadaran siswa untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Hal itu ditandai dengan marak terjadi perilaku-perilaku siswa yang tidak mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dewasa ini, seperti melanggar tata tertib sekolah, menyontek pada saat ujian berlangsung, terkikisnya sopan santun terhadap guru dan orang tua, terlibat aksi anarkis dalam tawuran antar sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian Santoso, *Center for Research and Development of Health Ecology*, NIHRD (<http://digilib.itb.ac.id>) pada tahun 2000 persentase perilaku kenakalan remaja di provinsi Jawa Barat baik di kota maupun di desa, yaitu: (1) mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi (di kota 22,4 % sedangkan di desa 10,6 %); (2) tidak mengikuti pelajaran di sekolah tanpa izin guru atau dengan kata lain membolos (di kota 51,9 % sedangkan di desa 33,7 %); (3) meninggalkan rumah tanpa izin orang tua (di kota 54,4 % sedangkan di desa 42,3 %); (4) mencoret-coret dinding (di kota 26,3 % sedangkan di desa 23,6 %); (5) pemerasan (di kota 2,2 % sedangkan di desa 5,0 %); (6) pencurian (di kota 6,3 % sedangkan di desa 8,2 %); (7) perusakan gedung (di kota 12,5 % sedangkan di desa 5,7 %).

Dari data di atas dapat dicermati bahwa perilaku-perilaku siswa tersebut sangat bertentangan dengan sikap tanggung jawab yang seharusnya telah terinternalisasikan pada diri siswa. Hal itu tidak hanya terjadi di perkotaan melainkan di pedesaan juga, bahkan diantaranya telah tergolong kepada tindakan kriminalitas. Selain itu, diperoleh temuan lain dari hasil penelitian tersebut dimana usia rata-rata remaja yang mulai melakukan kenakalan antara 15-19 tahun sedangkan remaja yang mulai melakukan coretan di dinding pada usia kurang dari 15 tahun. Ironisnya, pada usia tersebut adalah usia dimana siswa sedang duduk di

bangku sekolah, baik tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas.

Senada dengan hal di atas, menurut data Sentro Pelayanan Kepolisian (SPK) POLRES Purwakarta, selama bulan Oktober 2011 tercatat delapan kasus tawuran antarpelajar dan perusakan barang milik orang lain dan pada minggu pertama di bulan November 2011 tercatat empat kasus tawuran antarpelajar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa peristiwa tawuran antarpelajar dan perusakan barang milik orang lain relatif sering terjadi dan cenderung berulang dalam rentang waktu yang berdekatan. Hal ini tentunya tidak dapat ditolerir lagi dan tidak sesuai dengan pembinaan karakter yang diharapkan.

Lickona dalam Megawangi (2007: 7) mengemukakan sepuluh gejala perilaku individu yang mengarah pada kehancuran suatu bangsa, salah satunya yaitu “menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara”. Hasil penelitian Megawangi (2007: 9) mengenai rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara menunjukkan bahwa dari 5 Sekolah Menengah Kejuruan-Teknik Industri (SMK-TI) di Bogor sering terjadi vandalisme, dimana 20 % remaja di Sekolah Menengah Kejuruan-Teknik Industri (SMK-TI) di Bogor mengakuinya. Hal itu terlihat dari banyaknya graffiti/corat-coret di tempat umum, banyaknya anak remaja yang berperilaku tidak peduli/cuek, sampah bertebaran dimana-mana baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Disisi lain, terjadi pula peningkatan perilaku merusak diri yaitu 30,3 % siswa terlibat minuman keras, 15,4 % siswa pecandu narkoba, 34,6 % siswa berjudi/taruhan, 68 % siswa menonton film porno, 3,2 % siswa pernah melakukan hubungan seks.

Hal tersebut serupa dengan kondisi paradoksial antara nilai dan fakta dewasa ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007: 166) diantaranya seperti, “kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi dengan baju profesionalisme, nepotisme lokal dan institusional, penyalahgunaan wewenang”. Contoh-contoh tersebut cenderung mengarah kepada sikap mental yang lemah. Soewardi dalam Budimansyah (2010: 11) mengungkapkan gejala kelemahan salah satunya

yaitu “cepat menyerah (*give up*): tidak memiliki semangat yang cukup besar untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berat, ia lantas menyerah”.

Beragam kondisi yang telah dipaparkan di atas tentu saja sangat memprihatinkan berbagai pihak, salah satunya Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, Budiartna dalam Sapriya (2007: 127), mengemukakan bahwa: “tayangan porno, komik cabul, majalah, VCD, narkoba, hingga perjudian kian tak terkendali”. Kerisauan ini juga senada dengan pendapat Wahyu dalam Somantri (2011: 225) bahwa: “...banyak terjadi peristiwa yang memiriskan budi kemanusiaan. Kita melihat bagaimana martabat kemanusiaan bangsa Indonesia sudah tepuruk ke jurang paling dalam, mendekati tingkat kebinatangan”.

Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak segera diatasi maka generasi muda bangsa ini akan mengalami kekacauan (*chaos*) dan kehancuran yang dahsyat di berbagai sisi. Oleh karena itu pembinaan karakter sangatlah penting, sebagaimana yang tercantum dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 (2010: 1) salah satunya yaitu “secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis”.

Inti karakter sebagaimana diungkapkan oleh Budimansyah (2010: 1) adalah “kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir baik (*thinking good*), berperasaan baik (*feeling good*), dan berperilaku baik (*behaving good*)”. Ungkapan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam membangun karakter yang baik itu harus secara menyeluruh meliputi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Berkaitan dengan hal ini, Pusat Kurikulum (2010: 9-10) memformulasikan 18 nilai-nilai karakter, sebagai berikut:

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan nilai karakter yang sangat esensial dalam pembinaan karakter bangsa dan secara tersirat sebagai muara dari karakter lainnya, sebab di dalamnya telah mencakup semua lingkup kehidupan baik pribadi, keluarga, sekolah, maupun masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal itu dapat dilihat dari deskripsi tanggung jawab yang tercantum dalam Pusat Kurikulum (2010: 28), yaitu “sikap dari perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa”.

Pada hakekatnya, tanggung jawab penting dimiliki oleh setiap manusia berkenaan dengan perannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Mustari (2011: 29) mengemukakan bahwa: “tanggung jawab pada akhirnya adalah menyangkut kedirian kita, siapa kita, dan mengapa kita harus berbuat ini dan itu. Karena tanggung jawab berarti eksistensi kita”. Selain itu Asmani (2011: 89) mengungkapkan bahwa, “tanggung jawab merupakan kata kunci dalam meraih kesuksesan”. Kedua pendapat di atas dapat dimaknai bahwa jatidiri seseorang dapat dilihat dari bagaimana dan sejauhmana seseorang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik serta jika tanggung jawabnya telah berhasil dilaksanakan sebaik-baiknya, maka ia akan menjadi pribadi yang sukses dalam hidupnya.

Pentingnya tanggung jawab juga tidak terlepas dari tujuan “*Civic Education*” (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagaimana yang dikemukakan oleh Quigley dalam Winataputra dan Budimansyah (2007: 58) yaitu: “...*it is the participation of informed and responsible citizens, skilled in the arts of deliberation and effective action*”, yang berarti bahwa bukan hanya sekadar partisipasi dari warganegara tetapi benar-benar sebagai partisipasi yang cerdas dan penuh tanggung jawab, serta terampil dalam melakukan tindakan yang terarah dan efektif. Hal ini semakin diperkuat dengan misi nasional Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks “*value-based education*” menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 86) “bertujuan untuk mengembangkan

potensi individu agar menjadi Warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab”.

Tanggung jawab menjadi salah satu indikator esensial yang harus dimiliki oleh seorang warga negara. Aristoteles dalam Nurmalina dan Syaifullah (2008: 45) mengemukakan bahwa, “warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) atau kebajikan (*virtue*) selaku warga negara”. Lebih lanjut Nurmalina dan Syaifullah (2008: 46) menegaskan bahwa, “warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku”. Dengan demikian, warga negara yang bertanggung jawab sudah dapat dipastikan cerminan dari warga negara yang baik.

Dalam membentuk warga negara yang baik, diperlukan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang saling komplementer. Kompetensi kewarganegaraan menurut Branson dalam Winataputra dan Budimansyah (2007: 186) terdiri atas “*civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*”. *Civic Knowledge* berarti Pengetahuan Kewarganegaraan, *Civic Skills* berarti Kecakapan Kewarganegaraan, dan *Civic Dispositions* berarti Watak Kewarganegaraan.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan salah satu komponen penting yang harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan pada setiap individu sebagai profil ideal warga negara yang berkarakter. Winataputra (2001: 317) mendefinisikan *Civic Skills* yaitu “perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara”. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa aspek-aspek Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi kemampuan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan yang merupakan modal dasar bagi seorang warga negara untuk terjun ke masyarakat kelak.

Dalam kaitan ini, kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 188-190) terdiri atas “kecakapan intelektual (kecakapan berpikir kritis) dan kecakapan partisipasi yang bertanggung jawab,

efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*". Selain itu, Sapriya (2002: 72) menggolongkan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi: "1) keterampilan menginvestigasi, 2) berkomunikasi, dan 3) berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

Pembinaan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) tidak hanya diperoleh dalam lingkungan sekolah, melainkan di luar kelas/sekolah. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan dimaknai sebagai *citizenship education* menurut Cogan dalam Winataputra dan Budimansyah (2007: 10) yaitu "mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media". Begitupun dengan pendidikan karakter secara mikro dapat ditinjau dari empat pilar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budimansyah (2010: 58) yaitu "kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (*school culture*), kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam masyarakat". Oleh karena itu Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian yang saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Salah satu upaya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan karakter bangsa dapat dilakukan melalui kegiatan Pramuka. Dalam lingkup sekolah, Pramuka tergolong pada kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan kurikulum 2013, Pramuka dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dan harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 yaitu:

dalam kurikulum 2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dari Sekolah Dasar (SD/MI) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), dalam pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan organisasi Kepramukaan setempat/terdekat.

Menurut Budimansyah (2010: 90), "...kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian peserta didik...". Lebih lanjut Danial dalam Somantri (2011: 635) mengemukakan kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi sosial yaitu "mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, kerjasama, toleransi, bergaul bersama teman".

Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti warga negara yang muda dan berkarya. Gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi yang mewadahi proses Pendidikan Kepramukaan di Indonesia. Kwarnas dalam Usman (2011: 8) menyatakan bahwa Pendidikan Kepramukaan adalah:

proses pendidikan yang praktis, diluar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak, kepribadian dan akhlak mulia.

Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka merupakan sistem nilai yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan Kepramukaan. Tri Satya berisi: "Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: (1) menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila; (2) menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat; (3) menepati Dasa Dharma". Dasa Dharma berisi: "Pramuka itu: (1) takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; (3) patriot yang sopan dan kesatria; (4) patuh dan suka bermusyawarah; (5) rela menolong dan tabah; (6) rajin, terampil, dan gembira; (7) hemat, cermat, dan bersahaja; (8) disiplin, berani, dan setia; (9) bertanggung jawab dan dapat dipercaya; (10) suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan". Tri Satya dan Dasa Dharma dijadikan sebagai acuan atau standar tingkah laku seorang Pramuka, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang Pramuka berkarakter baik jika telah mampu melaksanakan keduanya. Oleh karena itu Tri Satya dan Dasa Dharma dijadikan sebagai kode kehormatan Pramuka.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Magdalena (2011) tentang Pembinaan Nilai Kedisiplinan Melalui Program Ekstrakurikuler Pramuka diperoleh gambaran bahwa program ekstrakurikuler Pramuka telah memberikan sumbangsih dalam membantu peserta didik menjadi lebih disiplin. Hal tersebut dapat dilihat dari materi dan kegiatan yang diberikan oleh pembina Pramuka seperti, mengajarkan agar peserta patuh pada ayah bunda, menyelesaikan tugas tepat waktu, tertib mengikuti upacara, patuh pada peraturan. Sejalan dengan hal itu, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu menekankan bagaimana pengaruh kegiatan Pramuka terhadap pembinaan karakter, khususnya nilai tanggung jawab.

Fungsi Kepramukaan menurut Sunardi (2011: 4) salah satunya yaitu “alat (*means*) bagi masyarakat, negara atau organisasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya”. Berkaitan dengan hal tersebut, Boden Powell sebagai Bapak Pendiri Pramuka dalam Usman (2011: 21) mengemukakan tujuan latihan Kepramukaan adalah: “....*to improve the standard of our future citizenship, especially in character and health, to replace self by service, to make the land individually efficient, morally and physically with the object of using that efficiency for service for fellowmen*”. Pernyataan Powell tersebut dapat dimaknai bahwa latihan Kepramukaan bertujuan untuk memperbaiki kualitas warga negara masa datang, terutama dalam hal watak dan kesehatan, lebih mengutamakan bakti daripada kepentingan pribadi, membentuk atau menyiapkan generasi muda menjadi pribadi yang berdaya guna, baik moral, mental, spiritual, intelektual, emosional, maupun fisik dan keterampilan agar dapat bermanfaat dalam baktinya terhadap sesama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pembinaan Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) Dalam Kegiatan Pramuka Untuk Membentuk Tanggung Jawab Siswa”.



## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekaligus wahana pengembangan nilai/karakter yang pelaksanaannya harus lebih efektif dan kondusif.
2. Tujuan kegiatan Pramuka adalah untuk memperbaiki kualitas warga negara masa datang, terutama dalam hal watak dan kesehatan yang selanjutnya akan berdampak pula pada kualitas tanggung jawabnya baik secara personal, moral, maupun sosial.
3. Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan modal dasar bagi siswa sebagai individu warga negara untuk terjun ke masyarakat kelak.
4. Tanggung jawab merupakan karakter/sikap utama yang harus dimiliki oleh setiap siswa generasi penerus bangsa sebagai cerminan warga negara yang baik.
5. Pelaksanaan sikap tanggung jawab siswa dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini disinyalir mengalami penurunan menyusul maraknya pelanggaran tata tertib sekolah, aksi tawuran anarkis, kasus kriminalitas, hingga tindakan asusila.
6. Kegiatan Pramuka yang membina kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) diharapkan dapat berperan secara maksimal dalam membentuk tanggung jawab siswa.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh aktivitas dalam kegiatan Pramuka terhadap pembinaan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta?.
2. Bagaimana pengaruh aktivitas dalam kegiatan Pramuka terhadap pembentukan tanggung jawab siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta?.
3. Bagaimana pengaruh aktivitas dalam kegiatan Pramuka yang membina kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) terhadap pembentukan tanggung jawab siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh aktivitas dalam kegiatan Pramuka terhadap pembinaan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh aktivitas dalam kegiatan Pramuka terhadap pembentukan tanggung jawab siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh aktivitas dalam kegiatan Pramuka yang membina kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) terhadap pembentukan tanggung jawab siswa SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pembinaan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dalam kegiatan Pramuka untuk membentuk tanggung jawab siswa serta memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu mata pelajaran pengembang pendidikan karakter bangsa.

### **2. Praktis**

#### **a. Sekolah**

Memberikan bahan masukan khususnya mengenai strategi pembinaan Pendidikan Karakter dalam konteks mikro, yaitu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka secara efektif dan optimal.

#### **b. Kwarcab**

Menghidupkan kembali gerakan Pramuka secara utuh dan menyeluruh dengan inovasi baru baik yang bersifat substansial maupun operasional.

#### **c. Pemerintah**

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam upaya pembangunan bangsa yang berkarakter.

## **F. Struktur Organisasi Tesis**

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, peneliti akan menyelesaikan struktur organisasi tesis peneliti sebagai berikut: BAB I tentang Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan beberapa sub bab, antara lain (1) Latar Belakang Penelitian, (2) Identifikasi Masalah Penelitian, (3) Rumusan Masalah Penelitian, (4) Tujuan Penelitian, (5) Manfaat Penelitian, (6) Struktur Organisasi Tesis. BAB II membahas Kajian Teoritis dan Hipotesis Penelitian. Pada bab ini terbagi dalam sub bab, antara lain: (1) Kegiatan Pramuka, (2) Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*), (3) Tanggung Jawab, (4) Teori Belajar Sosial, (5) Hubungan Antara Pendidikan Karakter, Kegiatan Pramuka, dengan Pendidikan Kewarganegaraan,

(6) Penelitian yang Relevan, (7) Hipotesis. BAB III membahas Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri atas beberapa sub bab, antara lain: (1) Pendekatan dan Metode Penelitian, (2) Prosedur Penelitian, (3) Populasi dan Sampel Penelitian, (4) Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, (5) Instrumen Pengumpulan Data, (6) Hasil Uji Coba Instrumen, (7) Teknik Pengumpulan Data, (8) Teknik Analisis Data. BAB IV membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini terbagi dalam sub bab, antara lain: (1) Hasil Penelitian, (2) Pembahasan Hasil Penelitian, (3) Temuan Penelitian. BAB V membahas Simpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini terbagi dalam sub bab antara lain: (1) Simpulan, (2) Rekomendasi.

